PENGAWASAN DAN PELAPORAN PEMBIAYAAN SEKOLAH DI INDONESIA: TANTANGAN, PELUANG, DAN PEMBELAJARAN DARI SISTEM PENDANAAN PENDIDIKAN KANADA

Toho Fervin Marulitua Situmorang[1], Jakaria[2], Yantoro[3], Ali Idrus[4]

[1,2,3,4,5]*Universitas Jambi, Indonesia*
E-mail : [1]toho.fervin@gmail.com, [2]0708jakaria@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the system of supervision and financial reporting of school funding in Indonesia, identify its structural risks, and draw critical comparative lessons from the educational funding mechanisms implemented in Canada. Operating within a qualitative approach using a literature review method, this study examines financial regulations, agency theories, and empirical research documents regarding educational management. The findings demonstrate that while the nationwide implementation of the School Activity and Budget Plan Application (ARKAS) significantly enhances bureaucratic transparency, schools still encounter substantial operational risks, including fund disbursement delays, rapid regulatory changes, and limited technological infrastructure. Under the lens of Agency Theory, a head-to-head comparison reveals that Canada minimizes information asymmetry by accentuating outcome-based accountability and a highly progressive needs-based funding formula, whereas Indonesia concentrates heavily on rigid input compliance. Additionally, applying Resource Dependence Theory clarifies that the 40% honorarium restriction in Permendikdasmen No. 8 of 2025 triggers a double agency dilemma strictly for resource-dependent private schools. This study concludes that a strategic shift toward flexible digital governance and needs-based resource distribution is critical to mitigating residual losses and improving educational accountability in Indonesia.

Keywords : *Accountability; ARKAS; Educational Finance; Agency Theory; School Funding*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pengawasan dan pelaporan keuangan pembiayaan sekolah di Indonesia, mengidentifikasi risiko strukturalnya, serta menyintesis pembelajaran komparatif kritis dari mekanisme pendanaan pendidikan yang diterapkan di Kanada. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan, penelitian ini mengkaji regulasi keuangan, teori-teori keagenan, serta dokumen penelitian empiris terkait manajemen pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun implementasi nasional Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) secara signifikan meningkatkan transparansi birokratis, sekolah masih menghadapi risiko operasional yang substansial, termasuk keterlambatan pencairan dana, perubahan regulasi yang cepat, dan keterbatasan infrastruktur teknologi. Berdasarkan pisau analisis Teori Keagenan, perbandingan head-to-head menunjukkan bahwa Kanada meminimalkan asimetri informasi dengan menekankan akuntabilitas berbasis hasil (outcome) dan formula pendanaan berbasis kebutuhan (needs-based funding) yang sangat progresif, sementara Indonesia masih terkonsentrasi padat pada kepatuhan input yang kaku. Selain itu, penerapan Resource Dependence Theory mengklarifikasi bahwa pembatasan honorarium maksimal 40% dalam Permendikdasmen No. 8 Tahun 2025 memicu dilema keagenan ganda (double agency dilemma) khusus bagi sekolah swasta yang dependen pada anggaran negara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pergeseran strategis menuju tata kelola digital yang fleksibel dan distribusi sumber daya berbasis kebutuhan sangat krusial untuk memitigasi dampak buruk (residual loss) serta meningkatkan akuntabilitas pembiayaan pendidikan di Indonesia.

Kata Kunci : *Akuntabilitas; ARKAS; Dana Sekolah; Pembiayaan Pendidikan; Teori Keagenan.*

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan instrumen utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, di mana keberhasilannya sangat bergantung pada pengelolaan pembiayaan yang efektif, transparan, dan akuntabel (Mulyasa, 2023). Keberhasilan program pendidikan di satuan pendidikan sangat dipengaruhi oleh kecukupan anggaran serta efektivitas tata kelola administrasinya (Fattah, 2022). Di Indonesia, komitmen anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah diimplementasikan, salah satunya melalui skema dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) atau Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, 2025). Dana ini dirancang untuk mendukung biaya operasional nonpersonalia agar sekolah dapat menyelenggarakan layanan secara lebih optimal (Hidayat & Tolla, 2021).

Namun demikian, meningkatnya alokasi finansial ini belum sepenuhnya linear dengan peningkatan mutu hasil belajar siswa jika tidak dibarengi dengan sistem pengawasan dan pertanggungjawaban yang kuat (Mardiasmo, 2018). Aparat pengawas internal pemerintah masih kerap menemukan tantangan serius berupa asimetri informasi dan moral hazard di lapangan, mulai dari keterlambatan administrasi hingga ketidaksesuaian penggunaan anggaran. Isu kritis dalam penelitian ini berfokus pada ketimpangan antara arah regulasi formal mutakhir—yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8 Tahun 2025—dengan realitas manajerial sekolah yang menghadapi kendala infrastruktur digital dan keterbatasan kompetensi SDM keuangan (Aliyah et al., 2025). Penelitian ini bertujuan membedah proses pengawasan pembiayaan tersebut secara holistik, mengidentifikasi risiko sistemiknya, serta mensintesis pembelajaran praktis dari sistem pendanaan Kanada (Needs-Based Funding) dengan pisau analisis teori keagenan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) untuk menganalisis secara mendalam model pembiayaan pendidikan global. Sumber data utama dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi data literatur sekunder yang mencakup artikel jurnal ilmiah bereputasi, buku teks manajemen pembiayaan, serta dokumen kebijakan makro seperti Education Finance Watch dari World Bank dan laporan performa pendidikan OECD. Analisis data dilakukan secara komparatif dan sintetik. Peneliti memetakan perbedaan struktur pendanaan nasional (skema BOS) di Indonesia dengan sistem desentralisasi finansial Kanada. Selanjutnya, dilakukan analisis kelayakan (feasibility study) terhadap instrumen pembiayaan inovatif dari dokumen Patrinos dan Tanaka (2024) untuk diadopsi ke dalam konteks regulasi di Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tata kelola keuangan pendidikan di era modern menuntut adanya harmonisasi antara pengawasan birokratis dan fleksibilitas operasional satuan pendidikan. Di Indonesia, transformasi instrumen monitoring terkunci melalui pemanfaatan rilis regulasi terbaru serta digitalisasi pelaporan akuntansi sekolah. Berdasarkan landasan hukum mutakhir, yaitu Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), pemerintah menerapkan batasan plafon pengeluaran yang ketat sebagai mekanisme kontrol formal untuk mereduksi potensi penyimpangan anggaran. Untuk membedah

efektivitas regulasi ini secara mendalam, studi komparatif dengan sistem pendanaan pendidikan di Kanada disintesis menggunakan pisau analisis Teori Agensi (Agency Theory) yang digagas oleh Jensen dan Meckling (1976).

Dalam bingkai Teori Agensi, hubungan tata kelola keuangan sekolah diposisikan sebagai relasi antara Principal (pemberi mandat anggaran/negara/masyarakat) dan Agent (pelaksana mandat/kepala sekolah dan bendahara). Asimetri informasi (information asymmetry) yang terjadi akibat jarak sosiologis dan birokratis antara kedua belah pihak dimitigasi dengan pendekatan yang berbeda di masing-masing negara, sebagaimana dijabarkan dalam matriks komparatif berikut:

Tabel 1. Matriks Komparatif Tata Kelola Keuangan Indonesia Dan Kanada Dalam Teori Agensi

Dimensi Analisis	Sistem di Indonesia (Permendikdasmen No. 8/2025)	Sistem di Kanada (Fokus: Ontario/Alberta)	Analisis Perspektif Teori Agensi (Agency Theory)
Hubungan Principal-Agent	Hubungan bersifat birokratis-sentralistik. Pemerintah Pusat mendikte batas alokasi secara kaku (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, 2025).	Hubungan berbasis kemitraan delegatif. School Boards diberikan otonomi finansial tinggi terikat kontrak kinerja makro (Herman, 2013).	Pengaturan batas kuota belanja kaku mencerminkan upaya principal membatasi discretionary power agent (Jensen & Meckling, 1976).
Asimetri Informasi & Monitoring	Diminimalisir melalui integrasi sistem digital ARKAS dan SIPLah untuk mengunci kepatuhan input belanja (Aliyah et al., 2025).	Diminimalisir melalui sistem audit publik daring, pelaporan terpadu, dan pemantauan indikator mutu (The Education Trust-Midwest, 2020).	Indonesia mengontrol ketat pilihan input anggaran agent, sedangkan Kanada memitigasi asimetri informasi pada kualitas output.
Mekanisme Insentif & Disinsentif	Alokasi BOS Kinerja sebagai insentif. Disinsentif berupa penundaan dana jika laporan ARKAS terlambat (Permendikdasmen No. 8/2025).	Menggunakan pendekatan Needs-Based Funding proporsional berbasis karakteristik risiko siswa (Herman, 2013).	Sanksi penundaan salur di Indonesia akibat kelalaian administratif agent berisiko memicu dampak buruk langsung pada siswa (residual loss).
Biaya Agensi (Agency Costs)	Biaya pengawasan administratif (monitoring costs) sangat tinggi karena Agent harus membuktikan kepatuhan terhadap persentase angka plafon kaku di	Biaya pengawasan lebih efisien karena sistem audit terintegrasi pada level makro, namun memiliki biaya pengikatan (bonding costs) yang tinggi untuk	Regulasi baru di Indonesia menaikkan biaya kepatuhan (compliance cost) bagi sekolah untuk menyesuaikan alokasi internal. Fokus tata kelola perlu diarahkan

	setiap tahapan rekon anggaran.	standardisasi kualifikasi guru.	agar beban pengawasan administratif tidak mendistorsi energi utama *Agent* dari esensi peningkatan mutu belajar murid.

Konsekuensi yuridis dari pemberlakuan batasan restriksi anggaran dalam Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025—seperti pembatasan pembayaran honor guru/tendik non-ASN maksimal 40% bagi satuan pendidikan swasta, batasan sarpras maksimal 20%, dan kewajiban buku minimal 10%—tidak dapat disamaratakan dampaknya terhadap seluruh sekolah swasta. Berdasarkan kerangka teoretis Resource Dependence Theory (Teori Ketergantungan Sumber Daya) yang dikembangkan oleh Pfeffer dan Salancik (1978), derajat kerentanan dan perilaku tata kelola suatu organisasi nirlaba sangat ditentukan oleh tingkat ketergantungannya pada penyedia sumber daya eksternal. Fenomena ini membagi satuan pendidikan swasta ke dalam dua kelompok utama dengan karakteristik konflik agensi yang berbeda:

a. Kelompok Sekolah Swasta Bersumber Dana Utama dari BOSP

Bagi satuan pendidikan swasta menengah ke bawah yang menempatkan Dana BOSP sebagai instrumen pembiayaan utama operasional, pembatasan kaku kuota honor maksimal 40% memicu terjadinya Double Agency Dilemma (Jensen & Meckling, 1976). Kepala sekolah selaku Agent menghadapi benturan kepentingan yang tajam antara kewajiban mematuhi aturan formal negara (Principal 1) dan tanggung jawab moral-profesional untuk menjaga stabilitas kesejahteraan tenaga pendidik di bawah naungan yayasan (Principal 2). Ketika ruang gerak finansial dikunci secara ketat oleh regulasi, kebijakan pembatasan input ini rentan meningkatkan risiko moral hazard berupa potensi manipulasi entri data pada aplikasi ARKAS demi menghindari sanksi administratif penundaan dana, atau memicu penurunan motivasi mengajar guru yang bermuara pada penurunan mutu belajar siswa (residual loss).

b. Kelompok Sekolah Swasta Bersumber Dana Utama dari Dana Mandiri (SPP)

Sebaliknya, pada klaster satuan pendidikan swasta dengan basis pendanaan mandiri yang kokoh—di mana pembiayaan komponen belanja pegawai atau operasional utama ditopang secara dominan oleh kontribusi finansial masyarakat (SPP dan Uang Pangkal) sesuai dengan amanat Pasal 46 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional—pengaruh pembatasan kuota honor 40% dari Dana BOSP tersebut bersifat minor atau tidak signifikan. Diversifikasi finansial ini mereduksi tingkat ketergantungan (resource dependence) sekolah terhadap anggaran negara, sekaligus memperluas discretionary power kepala sekolah selaku Agent. Dana BOSP yang diterima dapat dialokasikan secara murni sebagai dana suplemen untuk peningkatan mutu materiil pembelajaran, seperti pemenuhan standar minimal 10% untuk buku/perpustakaan serta akselerasi program inovasi digital yang diamanatkan pemerintah.

Analisis ini mengukuhkan premis akademik bahwa efektivitas instrumen pengawasan tata kelola keuangan yang bersifat top-down oleh pemerintah senantiasa berkelindan dengan karakteristik struktur pendapatan mikro pada masing-masing agen di lapangan. Pendekatan pengelolaan dana pendidikan di Kanada, yang mengedepankan model desentralisasi finansial berwujud Needs-Based Funding—di mana anggaran diberikan secara fleksibel mengikuti profil kebutuhan riil dan karakteristik kerentanan siswa tanpa mendikte batas persentase belanja barang

secara mikro—dapat menjadi bahan refleksi regulatif jangka panjang guna mengatasi heterogenitas kondisi empiris sekolah swasta di Indonesia.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia telah berhasil mentransformasi tata kelola keuangan pendidikan dasar dan menengah ke dalam ekosistem digital melalui integrasi ARKAS, yang secara nyata meningkatkan transparansi administratif birokratis. Namun, efektivitas sistem pengawasan input secara kaku ini masih menghadapi risiko operasional sistemik berupa keterlambatan pencairan dana, kesiapan infrastruktur teknologi daerah, dan beban kepatuhan administratif yang tinggi bagi personel sekolah. Melalui analisis komparatif, sistem pendanaan Kanada memberikan perspektif bahwa akuntabilitas tata kelola yang optimal dicapai melalui desentralisasi formula berbasis kebutuhan siswa (needs-based funding) dan kontrol independen yang berorientasi pada keluaran mutu pembelajaran. Selain itu, restriksi persentase kuota belanja dalam Permendikdasmen No. 8 Tahun 2025 memicu dilema keagenan ganda serta risiko moral hazard yang asimetris, khususnya bagi klaster sekolah swasta kecil yang sangat dependen pada anggaran negara. Reformasi kebijakan pembiayaan pendidikan di Indonesia direkomendasikan untuk beralih secara inklusif menuju pengawasan berbasis performa edukatif yang fleksibel guna menjamin keadilan mutu belajar murid.

DAFTAR PUSTAKA

Aliyah, S., Mus, A. R., & Irmawati. (2025). Implementasi aplikasi ARKAS dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana BOS di sekolah. Jurnal Administrasi Pendidikan, 12(1), 45–58.

Bastian, I. (2015). Akuntansi sektor publik: Suatu pengantar (Edisi ke-3). Jakarta: Erlangga.

Creswell, J. W. (2018). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (5th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Fattah, N. (2022). Ekonomi dan pembiayaan pendidikan. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Herman, J. J. (2013). Education finance in Canada: Funding, equity, and accountability. Toronto: Canadian Education Association.

Hidayat, A., & Tolla, I. (2021). Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BPS). Jurnal Administrasi, Kebijakan, dan Kepemimpinan Pendidikan, 12(2), 115–128.

James, E. (1993). Why do different countries choose a different public-private mix of educational services? The Journal of Human Resources, 28(3), 571-592.

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of Financial Economics, 3(4), 305–360.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. (2025). Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan. Jakarta: Kemenperindasmen.

Mardiasmo. (2018). Akuntansi sektor publik. Yogyakarta: Andi Offset.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Mulyasa, E. (2022). Manajemen berbasis sekolah. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Mulyasa, E. (2023). Manajemen dan kepemimpinan kepala sekolah. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Patton, M. Q. (2015). Qualitative research & evaluation methods (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
Pfeffer, J., & Salancik, G. R. (1978). The External Control of Organizations: A Resource Dependence Perspective. New York: Harper & Row.
Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78. Jakarta: Secretariat Negara.
Robbins, S. P., & Coulter, M. (2018). Management (14th ed.). New York: Pearson Education.
Sedarmayanti. (2018). Good governance dan good corporate governance. Bandung: Mandar Maju.
Sedarmayanti. (2020). Reformasi administrasi publik, reformasi birokrasi, dan kepemimpinan masa depan. Bandung: Refika Aditama.
Sugiyono. (2023). Metode penelitian kualitatif. Bandung: Alfabeta.
Suharti. (2013). Trends in education funding in Indonesia and its equity implications (Doctoral dissertation). Australian National University, Canberra.
Terry, G. R. (2019). Principles of management. New Delhi: AITBS Publishers.
The Education Trust-Midwest. (2020). Funding systems and educational accountability in Canada. Retrieved from https://midwest.edtrust.org
Wele, M., & Mildawati, T. (2021). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan dana BOS. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, 10(5), 1–17. World Bank. (2020). Indonesia economic quarterly: Investing in people. Jakarta: World Bank Group.
Zed, M. (2018). Metode penelitian kepustakaan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Goh, W., Tan, J. N., Luo, Y., Ng, S., Sulaiman, M. B. M., Wong, J. M., & Loh, V. K. (2023).
Risk and protective factors associated with adolescent depression in Singapore: a systematic review. *Singapore Medical Journal*, *0*(0), 0. https://doi.org/10.4103/singaporemedj.smj-2021-192
Haryanto. (2015). *SistemDeteksiGangguanDepresi pada anak-anak dan Remaja*. https://doi.org/10.23917/jiti.v14i2.998
Inthaphatha, S., Yamamoto, E., Louangpradith, V., Takahashi, Y., Phengsavanh, A., Kariya, T., Saw, Y. M., &Hamajima, N. (2020). Factors associated with postpartum depression among women in Vientiane Capital, Lao People's Democratic Republic: A cross-sectional study. *PLoS ONE*, *15*(12 December). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0243463
Ishak, N. A., Ahmad, N. S., & Omar, M. N. (2020). Issues and trends of depression among students in malaysia. *Universal Journal of Educational Research*, *8*(11 B), 5951–5957. https://doi.org/10.13189/ujer.2020.082230
Jha, K. K., Singh, S. K., Nirala, S. K., Kumar, C., Kumar, P., &Aggrawal, N. (2017). Prevalence of depression among school-going adolescents in an Urban Area of Bihar, India. *Indian Journal of Psychological Medicine*, *39*(3), 287–292. https://doi.org/10.4103/0253-7176.207326
Kitchenham, B. (2004). *Procedures for Performing Systematic Reviews*. Maramis, M. M. (n.d.). *DEPRESI PADA LANJUT USIA*. https://www.researchgate.net/publication/336603865
Matsubara, C., Sakisaka, K., Sychareun, V., Phensavanh, A., & Ali, M. (n.d.). Anxiety and perceived psychological impact associated with needle stick and sharp device injury among tertiary hospital workers, Vientiane, Lao PDR. In *Reproductive Health and Research.*
Myo, T., Hong, S. A., Thepthien, B. O., &Hongkrailert, N. (2021). Prevalence and factors associated with postpartum depression in primary healthcare centres in Yangon, Myanmar.

Malaysian Journal of Medical Sciences, *28*(4), 71–86. https://doi.org/10.21315/mjms2021.28.4.8

Ngin, C., Pal, K., Tuot, S., Chhoun, P., Yi, R., & Yi, S. (2018). Social and behavioural factors associated with depressive symptoms among university students in Cambodia: A cross-sectional study. *BMJ Open*, *8*(9). https://doi.org/10.1136/bmjopen-2017-019918

Pruksarungruang, J., & Rhein, D. (2022). Depression Literacy: An Analysis of the Stigmatization of Depression in Thailand. *SAGE Open*, *12*(4). https://doi.org/10.1177/21582440221140376

Puyat, J. H., Gastardo-Conaco, M. C., Natividad, J., & Banal, M. A. (2021). Depressive symptoms among young adults in the Philippines: Results from a nationwide cross-sectional survey. *Journal of Affective Disorders Reports*, *3*. https://doi.org/10.1016/j.jadr.2020.100073

Rees, S. J., Mohsin, M., Klein, L., Steel, Z., Tol, W., Dadds, M., Eapen, V., da Costa, Z., Savio, E., Tam, N., &Silove, D. (2022). The impact of maternal depressive symptoms and traumatic events on early childhood mental health in conflict-affected Timor-Leste. *BJPsych Open*, *8*(2). https://doi.org/10.1192/bjo.2022.20

Samerin, A. (2019). BimbinganKonseling Islam UntukMengatasiDepresi di Hospital Bintulu Malaysia. *Anida (AktualisasiNuansaIlmuDakwah)*, *19*(2). https://doi.org/10.15575/anida.v19i2.7382

Seponski, D. M., Lahar, C. J., Khann, S., Kao, S., &Schunert, T. (2019). Four decades following the Khmer rouge: sociodemographic factors impacting depression, anxiety and PTSD in Cambodia. *Journal of Mental Health*, *28*(2), 175–180. https://doi.org/10.1080/09638237.2018.1466039

Singh, P. (2023). *Psychol Behav Sci Int J Depression in Children Psychology and Behavioral Science International Journal*. https://doi.org/10.19080/PBSIJ.2023.20.556037

Siregar, P. A., Diwanta, F., Marwa, N. A., &Purba, E. Y. (2023). KONSEP EPIDEMIOLOGI TERJADINYA DEPRESI DI INDONESIA. *JK: Jurnal Kesehatan*, *1*(1), 60–73.

Tan, G. T. H., Shahwan, S., Abdin, E., Lau, J. H., Goh, C. M. J., Ong, W. J., Samari, E., Kwok,

K. W., Chong, S. A., & Subramaniam, M. (2021). Recognition of Depression and Help-Seeking Preference Among University Students in Singapore: An Evaluation of the Impact of Advancing Research to Eliminate Mental Illness Stigma an Education and Contact Intervention. *Frontiers in Psychiatry*, *12*. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2021.582730

Tran, Q. A., Le, V. T. H., & Nguyen, T. H. D. (2020). Depressive symptoms and suicidal ideation among Vietnamese students aged 13–17: Results from a cross-sectional study throughout four geographical regions of Vietnam. *Health Psychology Open*, *7*(2). https://doi.org/10.1177/2055102920973253

WHO. (2023, March 31). *Depressive Disorder (Depression)*. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/depression.

Win, K. N., Tan, R. A. G., Sablee, M. R., Abas, M. F., Thu, K., Trivedi, A. A., Lai, A., Ismail, K., & Koh, D. (n.d.). PSYCHOLOGICAL IMPACT OF QUARANTINE AND ISOLATION DURING COVID-19 OUTBREAK IN BRUNEI DARUSSALAM. In

Muharram 1445H) Brunei International Medical Journal (Issue 7). www.bimjonline.com

Yi, S., Poudel, K. C., Yasuoka, J., Palmer, P. H., Yi, S., Yanagisawa, S., &Jimba, M. (2012). Sibling care, school performance, and depression among adolescent caretakers in Cambodia. *Asian Journal of Psychiatry*, *5*(2), 132–136. https://doi.org/10.1016/j.ajp.2012.04.002